

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., & Irawan, A. (2024). *The Influence of the Motor Vehicle Tax Reduction Program and Exemption of Transfer of Title Fees on Taxpayer Compliance in the North Jakarta Region*. 8(1), 538–547.
- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
- Ahmad, Susanto. 2016. Teori Efektivitas. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ammy, B. (2023). *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan , Pembebasan BBN , dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating*. 7, 173–183.
- Aulia, Neza., Maryasih, Lilis. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, Vol. 10 , No. 2 (2022): 137-152.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Bea, P., Nama, B., Sosialisasi, D. A. N., & Terhadap, P. (n.d.). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. 142–155.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Cornelia, A., Fitriandini, D., Permana, I., & Lestari, A. D. (2024). *Effectiveness Of Motor Vehicle Tax Payment Services Through The Sambara Application At P3dw Cirebon Regency I Sumber which includes a series of actions aimed at meeting the service needs of each individual in accordance with*. 3(3), 220–228.
- Erithrina, Y. . ., Rengkung, L. R., & Ngangi, C. R. (2018). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Bp2Rd Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 14(1), 409.
- Ferry W, Sri D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.
- Fatem, G. T. A. P., & Fatem, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jayapura. 175–182.
- Gunawan Aji, Diajeng Gumilang, Putri Handayani, Siti Amilah, E. N. F. (2023). *Original Articul*. 4(1), 10–21.

- Hafiz Hasan Noor. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bpprdsu). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Vol.2*, 2(4), 615–624.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Harahap, R. D., M. I. Harahap, dan M. E. Syari. (2019). Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam , 5 (2).
- Harahap, S. S. (2019). Manajemen Keuangan untuk UMKM: Pentingnya. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Sederhana. Penerbit Gramedia. Pustaka Utama.
- Heru Sudinta, Dwikora Harjo, Iwan Irwansyah, & Francky William Leonardo Lona. (2022). Motor Vehicle Tax Collection Potential and Fees for Returning the Name of Motor Vehicles in Belu Regency, Nusa Tenggara Timur. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(7), 1449–1460.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pajak Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kester, J., Noel, L., Zarazua de Rubens, G., & Sovacool, B. K. (2018). Policy mechanisms to accelerate electric vehicle adoption: A qualitative review from the Nordic region. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 94, 719–731.
- Konecny, V., Gnap, J., & Šimková, I. (2016). Impact of Fiscal Decentralization on Motor Vehicle Taxation in the Slovak Republic. *Transport and Telecommunication*, 17(1), 28–39.
- Lubis, L. J., Lubis, S., & Erlina, E. (2023). Analysis of the Effectiveness of Services on Motor Vehicle Tax Collection in the Regional Revenue Management Unit of the South Medan One-Stop Integrated Administration System (Samsat). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1979–1985.
- Mahmudi, (2007). Manajemen Kinerja Sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011). Penerbit CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah. 1(10), 6.
- Maulida, Rani. 2018. “Sistem Pemungutan Pajak.” Online Pajak. Retrieved April 2, 2022.

- Maulida, N. (2018). Perpajakan daerah: Konsep dan praktik. Yogyakarta: Deepublish.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah*. 1(10), 6.
- Memah, E. W. (2011). pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi. 1(3), 2007–2011.
- Moloeng, L.J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur, A. C., Annisa, A. H., & S, N. S. R. (2023). *Effectiveness of Motor Vehicle Tax Collection Services Through Samsat Outlets in the One-Roof Manunggal Administration System (Samsat) Office in the Takalar Region*. Jurnal Aktor, 3(1), 46–55.
- Nuroktaviani, N. P., & Halimatusadiah, E. (n.d.). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 181–186.
- Online, V., Putri, P., Chandra, B., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan , Tingkat Pendidikan , dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya). 2, 1–16.
- Pemerintah Provinsi Jambi. (2021). Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur No. 32 tahun 2021 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Priambodo, R. (2017). Psikologi kepatuhan wajib pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, P., Chandra, B., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan , Tingkat Pendidikan , dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya). 2, 1–16.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Risma, F., Muhammad, A., Aris, A., & Si, M. (2024). *Economics and Digital Business Review* Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pemutihan Pajak , Tarif Pajak Progresif , dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 5(2), 843–856.
- Safitri, J. (2020). Motor Vehicle Tax Seen from the Tax Assessment and Collection Method. *Journal Dimensie Management and Public Sector*, 1(2), 35–39. <https://doi.org/10.48173/jdmps.v1i2.51>
- SAMSAT Kota Jambi. (2023). Data jumlah wajib pajak dan realisasi PKB tahun 2016–2023. Jambi: SAMSAT Kota Jambi.
- Samsat, U. P. T., & Utara, M. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor , Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. 5(3), 1867–1882.
- Sakir, A. R. (2021). *Optimization of Motor Vehicle Tax Revenue through the Superior SAMSAT Program at UPT Revenue Maros*. 4494(2), 122–131.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, L. P. W. et al. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127–134.
- Simatupang, E. M. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Pajak Daerah Pada Samsat Upt Pangururan. 6(2), 18–27.
- Sita Irfani, M., Probowulan, D., & Pramono, D. E. (2019). Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 104.
- SKD Provinsi Lampung. 2013. Pendapatan daerah.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Nadeak, & Eva Sunasti. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973 /154 2018. *Buana Ilmu*, 4(1), 25–54.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Undang- undang nomor 25 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh

Yundrika, A. S., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 508–514.